

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Irfan Irenius Dwi Apriyanto Ananda Salim<sup>1</sup>, Hendrawati Hamid<sup>2</sup>  
NPP. 31.0785

*Asdaf Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur*  
*Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*  
Email: [ipanksalim17@gmail.com](mailto:ipanksalim17@gmail.com),  
[hendrawati@ipdn.ac.id](mailto:hendrawati@ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr.Ir.Hendrawati Hamid, M.Si.

## **ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The author focuses on the problem of the village's inability to analyze and utilize the potential that exists in the village, which causes the development of BUMDes. Community Participation in the Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is the topic of this research. Purpose:* *The purpose of this research is to collect data, analyze and produce findings that can provide a general picture of community participation in the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to realize community welfare in Ende Regency, East Nusa Tenggara Province, identify obstacles and efforts -efforts made to overcome these obstacles. Method:* *This research uses qualitative research methods which include descriptive techniques and analysis of community empowerment according to Adi Fahrudin's (2014) theory, namely Thought/Idea Participation, Skills and Proficiency Participation, and Social Participation. Data collection techniques used three data collection methods, namely in-depth interviews with 22 respondents, observation and documentation. The collected data is then analyzed starting from data reduction, followed by data presentation and drawing conclusions. Results/Findings:* *According to the findings obtained by the author in this research, the Ende Regency Regional Government through the Community and Village Empowerment Service has made efforts to increase community participation in the development of BUMDes. However, there are still obstacles in implementing this program. Conclusion:* *Community participation in developing BUMDes to realize community welfare in Ende Regency has so far not run optimally. In order to improve this, it is recommended that each village be able to utilize the potential that exists in the village to form BUMDes business units according to their respective characteristics. Socialization regarding BUMDes to village communities needs to be increased and every village needs to pay attention to the regeneration system in BUMDes management. Carrying out regular training for Subdistrict Technical Assistants, Village Field Assistants and Experts. Increasing collaboration with third parties and implementing programs aimed at improving the quality of human resources and awareness of millennials in developing villages. Society must open itself to very rapid world changes and be creative but not eliminate existing cultural values.*

**Keywords:** *Community Participation, BUMDes, Community Welfare*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan ketidakmampuan desa dalam menganalisa dan memanfaatkan potensi yang ada di desa sehingga menyebabkan tidak berkembangnya BUMDes. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan topik dari penelitian ini. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menghasilkan temuan yang dapat memberikan gambaran umum mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi penghambat, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melewati hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencakup teknik deskriptif dan analisis terhadap pemberdayaan masyarakat menurut teori Adi Fahrudin (2014) yaitu Partisipasi Pikiran/Ide, Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, dan Partisipasi Sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan Tiga metode pengumpulan data digunakan yaitu wawancara mendalam terhadap 22 responden, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis mulai dari reduksi data, diikuti dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Menurut temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes. Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam implementasi program ini. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende sejauh ini belum berjalan secara optimal. Guna meningkatkan hal tersebut disarankan untuk setiap desa agar mampu memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk membentuk unit-unit usaha BUMDes sesuai ciri khas masing-masing. Sosialisasi terkait BUMDes kepada masyarakat desa perlu ditingkatkan serta setiap desa perlu memperhatikan system regenerasi dalam kepengurusan BUMDes. Melakukan pelatihan rutin kepada Tenaga Pendamping Teknis Kecamatan, Pendamping Lapangan Desa dan Tenaga Ahli. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga serta melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM serta kesadaran kaum milenial dalam membangun desa. Masyarakat harus membuka diri terhadap perubahan dunia yang sangat cepat dan berkreasi namun tidak menghilangkan nilai budaya yang ada.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki kewajiban yang mutlak untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Hal inilah yang dilakukan oleh negara-negara berkembang sesuai falsafahnya masing-masing termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan telah mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Untuk itu dilaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Agar hal ini terwujud diperlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat.

Pembangunan Nasional di Indonesia diawali dengan penguatan wilayah pedesaan dalam bingkai NKRI yang merupakan bagian dari sembilan rencana Presiden Republik Indonesia dengan konsep Nawacita. Hal ini sesuai dengan fase baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimulai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan Undang-Undang ini semakin menegaskan status Desa sebagai pemerintahan yang mandiri, meskipun tidak secara langsung disebut sebagai daerah otonom seperti tingkat pemerintahan di atasnya.

Pembangunan di desa sangat penting dalam mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan, kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dengan pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi desa beserta sumberdayanya (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1)). Pembangunan dapat diperkuat melalui upaya pemberdayaan yang mempertimbangkan tingkat partisipasi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain bina manusia, usaha, lingkungan dan kelembagaan (Mariani, 2021). Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya, sehingga masyarakat mampu melayani serta memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah (Labolo, 2014:37).

Partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, adalah bagian integral dari proses pembangunan dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilannya (Santoso, 2018). Menurut Rukminto Adi (2003), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam hal ini akan meningkatkan kemandirian dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi perubahan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, salah satu lembaga yang berfungsi untuk membantu pembangunan di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (6) tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam arti lain dapat dikatakan bahwa negara berdiri di belakang desa (Yunanto, 2014).

Sebagai salah satu wilayah pemerintahan di Indonesia, provinsi Nusa Tenggara Timur pun melaksanakan pembangunan sebagai upaya untuk mensejahterahkan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah desa di NTT adalah sebanyak 3.353. Oleh karena itu, Nusa Tenggara Timur dikaruniai Sumber Daya Alam yang melimpah, tidak hanya hasil hutan melainkan juga hasil tambang, seperti mangan dan marmer, serta hasil laut. Namun, karena keterbatasan anggaran dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) mengakibatkan potensi yang ada tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar masyarakat masih berada dalam jeratan kemiskinan.

Kabupaten Ende merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi. Kabupaten Ende berada pada urutan ke-7 (tujuh) untuk peringkat kemiskinan. Hal ini tentunya perlu dijadikan sebuah kajian mengingat potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Ende. Jumlah desa tertinggal di Kabupaten Ende menurut *Global Flores* adalah 143 desa dengan 2 (dua) desa sangat tertinggal. Terbatasnya infrastruktur dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul secara tidak langsung mengakibatkan terhambatnya mobilitas ekonomi masyarakat.

Keterbatasan akses pasar dan kesulitan dalam mendistribusikan barang dan jasa menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten Ende melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai salah satu pilar perekonomian di desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikembangkan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Harapannya adalah agar BUMDes di kabupaten Ende aktif dan berkembang serta dapat menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaannya, BUMDes di Kabupaten Ende mengalami beberapa kendala. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende, dari 255 desa yang ada baru terbentuk sebanyak 105 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan 56 BUMDes telah mendapatkan intervensi dari dana desa. Dari 56 BUMDes tersebut hanya 22 yang aktif dan 34 tidak aktif. Hal ini justru sangat bertolak belakang apabila dilihat dari potensi Kabupaten Ende yang cukup besar di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan. Terjadinya hal ini diakibatkan oleh kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada.

Kendala selanjutnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan keberanian dalam membaca peluang berdasarkan potensi desa. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendampingan baik dari pemerintah, perguruan tinggi dan LSM menyebabkan dana desa yang besar tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya adalah pemahaman masyarakat yang homogen mengakibatkan minimnya daya cipta masyarakat dalam mengembangkan potensi desa untuk dimanfaatkan dalam pembentukan unit usaha. Selain itu juga, desa belum mampu menganalisis dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Adapun beberapa permasalahan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan tersebut adalah sebagian besar desa belum mampu menganalisis dan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Hal ini terbukti dari 255 desa baru terbentuk sebanyak 105 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan 56 BUMDes telah mendapatkan intervensi dari dana desa. Dari 56 BUMDes tersebut hanya 22 yang aktif dan 34 tidak aktif. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius mengingat BUMDes sendiri merupakan pilar utama perekonomian di desa yang dibentuk sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, letak Kabupaten Ende yang berlokasi di tengah Pulau Flores seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes.

Masalah selanjutnya adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pengelolaan BUMDes. Masyarakat cenderung untuk berpartisipasi pada penyampaian pikiran/gagasan sedangkan untuk pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada pengurus BUMDes. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan terkait dengan BUMDes serta kurangnya daya cipta masyarakat dalam membentuk suatu unit usaha BUMDes.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks partisipasi masyarakat maupun konteks pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian Ayu Mega Diarti (2020), yang berjudul “Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Bumdes Se-Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik”. Berdasarkan hasil

penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian Novita Bosuni dan Muhammad Farid Ma'ruf (2021) "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)". Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam pengelolaan wisata Setigi masyarakat Sekapuk antusias dalam pengelolaan wisata Setigi. Partisipasi masyarakat sekapuk juga membantu pertumbuhan perekonomian desa Sekapuk.

Penelitian Lisa Stevani Triyono (2023) "Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta". Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Tridadi kapasitas pengelola BUMDes dalam menggerakkan masyarakat sudah dilakukan secara maksimal. Selain itu, warga masyarakat Tridadi juga dilibatkan dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, dapat dikatakan bahwa BUMDes banyak menyerap tenaga kerja sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Penelitian Hyronimus Se dan Lambertus Langga (2021) "Peranan BUMDes dalam Mendukung Perekonomian Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan pemahaman dan pengelolaan yang serius terkait tujuan didirikan BUMDes dan pemanfaatan potensi-potensi desa yang dikelola BUMDes bersama masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Ely Rismanita dan Galih Wahyu Pradana (2022) "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro". Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan BUMDes dapat dirasakan manfaatnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat juga terlibat aktif dalam pelaksanaan program, terutama dalam memberikan sumbangan tenaga dan materi. Walaupun dalam pengambilan keputusan keterlibatan masyarakat masih kurang, masyarakat cukup berpartisipasi dengan baik dalam memberikan evaluasi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat perbedaan yang terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, metodenya yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yaitu pendekatan induktif. Menurut Hasan (2011), strategi induktif digunakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan kemudian menyimpulkan untaian umum dari informasi terkait dengan menganalisis secara mendalam sehingga mendapatkan kesimpulan yang utuh. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul yang juga berbeda dengan penelitian Mahbuban MS, Dewiristian, maupun Kiki Oktaviana. Selain itu pengukuran atau indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Adi Fahrudin (2014) yaitu Partisipasi Pikiran/Ide, Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, dan Partisipasi Sosial.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas

mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2015:58) mengatakan penelitian kualitatif adalah sebuah proses penafsiran yang melibatkan serangkaian praktik, yang secara kasar membantu mengungkapkan realitas yang lebih jelas. Dalam penelitian ini, fenomena direpresentasikan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, pencatatan, dan rekaman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Rukajat (2018:1), berpendapat jenis penelitian deskriptif berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif yang merupakan strategi pengajaran di mana konsep atau prinsip diajarkan menggunakan berbagai contoh, fakta, ilustrasi, atau pembenaran. Menurut Hasan (2011), strategi induktif digunakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan kemudian menyimpulkan untaian umum dari informasi terkait dengan menganalisis secara mendalam sehingga mendapatkan kesimpulan yang utuh.

Penulis mengumpulkan data menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Menurut Simangunsong (2017), sumber data penelitian adalah sumber diperolehnya sebuah data yang kemudian digunakan dalam suatu penelitian oleh peneliti. Data primer merupakan data utama dan asli serta selalu mengalami pembaharuan yang didapatkan secara langsung dari sumber dengan teknik observasi, diskusi kelompok, wawancara, kuesioner dan angket. Data sekunder merupakan data yang melengkapi data primer sebagai bahan penyempurna data seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Daerah Dalam Angka, jurnal, laporan, buku dan lainnya.

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan dari pemerintah pusat (Kementerian Desa) kepada pemerintah daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data primer merupakan data utama dan asli serta selalu mengalami pembaharuan yang didapatkan secara langsung dari sumber dengan teknik observasi, diskusi kelompok, wawancara, kuesioner dan angket. Data sekunder merupakan data yang melengkapi data primer sebagai bahan penyempurna data seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Daerah Dalam Angka, jurnal, laporan, buku dan lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 22 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Camat sebanyak 2 orang, Kepala Desa sebanyak 6 orang, Pengurus BUMDes sebanyak 6 orang, dan masyarakat sebanyak 6 orang. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* sampling. Menurut Sugiyono (2016), *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan digunakannya teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan pada penelitian kualitatif. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi masyarakat yang digagas oleh Adi Fahrudin (2014) yaitu Partisipasi Pikiran/Ide, Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, dan Partisipasi Sosial.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan pendapat dari Adi Fahrudin yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari beberapa jenis, yaitu partisipasi pikiran/ide, partisipasi keterampilan dan kemahiran, dan partisipasi sosial. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ende

Penulis melakukan pengukuran dalam penelitian ini menggunakan tiga dimensi partisipasi masyarakat menurut Adi Fahrudin (2014), untuk mengukur seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimensi tersebut adalah sebagai berikut: Partisipasi Pikiran/Ide, Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, dan Partisipasi Sosial.

##### 1. Partisipasi Pikiran/Ide

Partisipasi pikiran/ide merupakan kontribusi dalam bentuk ide, pendapat, atau konsep yang konstruktif, baik dalam merencanakan maupun menjalankan program, serta berkontribusi dalam mewujudkan program dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, partisipasi pikiran/ide merupakan partisipasi yang menekankan kepada kebebasan seseorang untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya. Partisipasi ini memiliki peranan penting sebagai landasan awal untuk menjalankan suatu pembangunan.

Berkaitan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Ende, partisipasi ini penting agar pemerintah desa mengetahui keinginan masyarakat agar dapat menentukan arah kebijakan selanjutnya terkait persoalan BUMDes. Masyarakat desa memiliki antusiasme yang besar dalam hal penyampaian ide dalam pertemuan terutama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dan sangat aktif dalam proses musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa sangat baik. Pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa pun memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat khususnya mengenai BUMDes. Kemudian dalam proses transfer ilmu dan pengalaman belum berjalan secara optimal meskipun pengurus sangat terbuka dalam membagi ilmunya di tengah kesibukan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat.

##### 2. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran adalah partisipasi yang diberikan untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri atau memberikan bantuan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada desa atau anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Tujuannya adalah agar individu mampu melakukan aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dalam mengembangkan BUMDes dibutuhkan keterampilan dalam hal kreatifitas dari masyarakat. Hal ini karena BUMDes merupakan hasil dari pengenalan potensi yang ada di desa yang kemudian dijadikan suatu badan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun sejalan dengan penelitian Destemi Elsi (2019) "Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui BUMDes di Desa Tanjung Lanjut Sekernan Muaro Jambi". Kreatifitas ini sangat penting untuk mendirikan suatu unit usaha BUMDes agar dapat memiliki daya tarik yang berbeda. Selain kreatifitas, dalam pengembangan BUMDes juga

dibutuhkan kemahiran dari para pengurus BUMDes agar dapat berjalan secara terorganisir. Hal ini terkait dengan administrasi BUMDes tersebut. Kemahiran juga diperlukan untuk membaca peluang dan situasi yang dapat menguntungkan BUMDes.

Hasil dari observasi penulis menunjukkan bahwa terjadi kurangnya keterampilan dan kemahiran. Hal ini dapat dilihat dari tidak termanfaatkannya potensi desa yang ada serta sebagian besar BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian besar BUMDes di Kabupaten Ende bergerak di bidang persewaan yang mengakibatkan tidak termanfaatkannya potensi desa. Selain itu, untuk indikator kemahiran mengembangkan BUMDes sangat bergantung pada ketersediaan kualitas SDM yang ada di desa tersebut. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang apabila dilihat dari potensi-potensi di setiap desa yang sangat beragam.

### 3. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial merupakan partisipasi yang diberikan sebagai tanda kegujuban. Hal ini dapat berupa pemberian perhatian atau menunjukkan kedekatan untuk mendorong partisipasi orang lain. Partisipasi ini juga merupakan penentu berjalannya suatu BUMDes. Untuk menjamin berkembangnya BUMDes tentunya pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat harus bahu membahu secara bersama-sama. Berkaitan dengan hal ini, BUMDes di Kabupaten Ende sendiri belum berjalan sebagai mana mestinya.

Proses kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak ketiga baik itu bersama Bank NTT, Wahana Visi Indonesia (WVI), maupun universitas sudah berjalan namun masih belum cukup maksimal dikarenakan belum semua BUMDes melakukan hal yang sama. Selain itu, proses kerjasama pemerintah dengan masyarakat masih belum berjalan baik dikarenakan kepedulian masyarakat di beberapa desa hanya pada sebatas pemberian ide/gagasan saja sedangkan untuk perkembangan BUMDes sendiri diserahkan kepada para pengurus dan pemerintah desa.

## **3.2. Penghambat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ende dan Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Ende terdapat beberapa hal yang menghambat pengembangan tersebut. Adapun penghambat tersebut diantaranya, yaitu:

### **1. Penghambat Internal**

Penghambat internal adalah penyebab terjadinya suatu fenomena sosial yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok. Hal ini mencakup aspek fisik dan psikologis. Aspek fisik mencakup kondisi fisik individu atau kelompok sementara aspek psikologis melibatkan kondisi mental individu atau kelompok.

Dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Ende terdapat beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan tidak berkembangnya BUMDes yang berasal dari dalam. Hal ini penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lokus penelitian ini yaitu di Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan faktor internal yang menjadi penghambat berkembangnya BUMDes di Kabupaten Ende adalah :

1. Ketidampampuan desa dalam menganalisis dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa desa yang tidak memiliki BUMDes dan 36 BUMDes yang tidak aktif. Adapun BUMDes yang unit usahanya bergerak di bidang persewaan baik itu tenda kursi maupun molen. Kabupaten Ende sendiri memiliki wilayah pertanian dan perkebunan yang cukup luas ditambah lagi dengan beberapa desa yang berada di wilayah

pesisir pantai. Selain itu, beberapa desa juga merupakan wilayah lintas kabupaten yang sangat memungkinkan untuk dijadikan media peningkatan kesejahteraan. Seharusnya potensi inilah yang dapat dimanfaatkan secara baik untuk menjadi unit usaha BUMDes.

2. Kurangnya sosialisasi yang menyebabkan tidak mampunya masyarakat memahami BUMDes

Sebagian masyarakat belum memahami tentang BUMDes sehingga segala persoalan yang ada di BUMDes diserahkan kepada pengurus dan pemerintah desa. Kegagalan BUMDes di beberapa desa tidak terlepas dari ketidakpahaman masyarakat sehingga mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes. Pentingnya sosialisasi tentu saja mempengaruhi hal ini. Pemerintah memiliki hambatan berupa kekurangan dana untuk melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat.

3. Proses regenerasi kepengurusan yang tidak berjalan dengan baik

Regenerasi dalam setiap organisasi sangat penting untuk menjamin eksistensi suatu organisasi. Apabila regenerasi tidak berjalan dengan baik maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan hilang pada suatu masa. Hal inilah yang terjadi pada 36 dari 54 BUMDes di Kabupaten Ende. Kegagalan regenerasi dan sebagai akibat dari ketidaksiapan SDM berkualitas yang ada di desa menyebabkan BUMDes tersebut tidak aktif. Hal ini juga terjadi sebagai akibat dari generasi muda yang merantau ke luar dan memiliki keinginan yang kurang untuk kembali dan membangun desa.

#### 4. Penghambat Eksternal

Penghambat eksternal adalah penyebab terjadinya fenomena sosial yang berasal dari luar individu atau kelompok. Hal ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu berasal dari lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. Lingkungan sosial bisa dari keluarga, teman, pesaing. Sedangkan lingkungan nonsosial seperti kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sumber daya.

Dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Ende terdapat beberapa penghambat yang mengakibatkan tidak berkembangnya BUMDes yang berasal dari luar. Hal ini penulis temukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lokus penelitian ini yaitu di Kabupaten Ende.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan dapat disimpulkan penghambat eksternal yang menjadi penghambat berkembangnya BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dana dan infrastruktur, dan SDM yang ada di desa menyebabkan pembangunan terhambat

Dana sangat penting dalam menjalankan suatu usaha sebagai modal untuk mengembangkan usaha dalam hal ini adalah BUMDes. Terbatasnya dana menyebabkan terhambatnya proses sosialisasi dan juga sebagai modal untuk mendirikan suatu BUMDes. Selain itu, beberapa desa memiliki jarak yang jauh menuju kota ditambah lagi dengan infrastruktur baik itu jalan maupun internet yang belum memadai. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan SDM yang ada di desa memiliki kapasitas yang terbatas.

2. Minimnya kesadaran kaum muda untuk kembali ke desa dan membangun desa

Terbatasnya kualitas pendidikan yang ada di daerah mengakibatkan masyarakat mencari pendidikan yang lebih layak di tempat lain. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Ende. Sebagian masyarakat Kabupaten Ende setelah menamatkan pendidikan di tingkat SMA melanjutkan pendidikannya di luar kota baik itu di ibu kota provinsi maupun di kota lain di pulau Jawa dan Bali. Hal ini sebetulnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas SDM. Akan tetapi, hanya sedikit dari masyarakat yang memiliki kesadaran untuk pulang ke daerah dan membangun daerah khususnya di desa.

#### Upaya Yang Dilakukan

Untuk mengatasi penghambat yang ada baik secara internal maupun eksternal terkait pengembangan BUMDes, pemerintah daerah Kabupaten Ende baik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pemerintah desa sendiri telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut diantaranya :

### **1. Upaya yang Telah Dilaksanakan**

1. Melakukan kerjasama dengan pihak NGO
2. Mengeluarkan surat edaran kepala dinas terkait himbauan reorganisasi BUMDes
3. Melakukan kegiatan jemput bola ke desa-desa.

### **2. Upaya yang Sedang Dilaksanakan**

1. Dinas mendata nama-nama BUMDes
2. Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan berkoordinasi untuk membangun kembali BUMDes.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Ende memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat di desa yang aktif BUMDesnya. Sebanyak 4 desa telah menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tentunya berguna untuk menyejahterahkan masyarakatnya. Sebetulnya BUMDes ini juga merupakan ruang bagi pengembangan kreatifitas masyarakatnya. Penulis menemukan temuan penting yakni partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes di Kabupaten Ende belum berjalan optimal. Hal ini mengakibatkan desa belum mampu menganalisa dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Untuk memanfaatkan potensi tersebut tentunya diperlukan kreatifitas sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat secara langsung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ayu Mega Diarti (2020), yaitu terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Keterampilan dan kemahiran yang diberikan dalam bentuk partisipasi sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan BUMDes.

Sejauh ini partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes di Kabupaten Ende masih sebatas pada penyampaian ide/gagasan saja. Sedangkan untuk proses pengembangan serta berjalannya BUMDes diserahkan kepada pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Untuk memajukan BUMDes itu sendiri dibutuhkan kerjasama antara semua kalangan khususnya masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ayu Mega Diarti (2020), yaitu terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila hanya pemerintah saja yang bergerak sedangkan masyarakat kurang berpartisipasi. Tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Di beberapa desa di Kabupaten Ende, terutama di wilayah terpencil, masyarakat masih belum memahami akan pentingnya BUMDes sebagai pilar perekonomian di desa. Hal ini karena terbatasnya infrastruktur yang ada di desa sehingga masyarakat kurang memiliki informasi terkait BUMDes. Sosialisasi terhadap masyarakat harus terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait BUMDes dan untuk meningkatkan keinginan untuk berpartisipasi secara aktif.

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan penghambat berkembangnya BUMDes di Kabupaten Ende yakni budaya masyarakat yang homogen yang mengakibatkan kurangnya daya cipta masyarakat terhadap unit usaha BUMDes. Selain itu, kesadaran kaum milenial untuk pulang membangun desa masih minim padahal desa sendiri membutuhkan pemikiran dan inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga pentingnya konsep *collaborative governance* untuk menunjang pembangunan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh (Subekti, T., & Irma Fitriana Ulfah, 2023).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende sejauh ini belum berjalan secara optimal. Guna meningkatkan hal tersebut disarankan untuk setiap desa agar mampu memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk membentuk unit-unit usaha BUMDes sesuai ciri khas masing-masing. Sosialisasi terkait BUMDes kepada masyarakat desa perlu ditingkatkan serta setiap desa perlu memperhatikan system regenerasi dalam kepemimpinan BUMDes. Melakukan pelatihan rutin kepada Tenaga Pendamping Teknis Kecamatan, Pendamping Lapangan Desa dan Tenaga Ahli. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga serta melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM serta kesadaran kaum milenial dalam membangun desa. Masyarakat harus membuka diri terhadap perubahan dunia yang sangat cepat dan berkreasi namun tidak menghilangkan nilai budaya yang ada.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, biaya penelitian dan kondisi cuaca di lokus penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur agar menemukan hasil kajian yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ayu, M. D., 2020. *Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan BUMDes Se-Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya.
- Bobsuni, N., & Ma'ruf, M. F. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)*. Publika, 215–226.
- Destemi Elsi, S., & Bafadhal, F. (2019). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui BUMDes di Desa Tanjung Lanjut Sekernan Muaro Jambi*. RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 33–37. \
- Fahrudin, Adi. (2014). *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Triyono, L.S. 2023. *Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Tridadi, Kapanewon Sleman. Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Muhadam Labolo. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. PT. Rajagrafindo.
- Rismanita, E., & Pradana, G. W. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*. Publika, 149–158.
- Santoso, E. B., & Moenek, R. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Balikpapan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. 8(2).
- Se, H., & Langga, L. (2021). *Peranan BUMDes dalam Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende*. Volume 5 [.
- Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoretik Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Subekti, T., & Irma Fitriana Ulfah. (2023). *Collaborative Governance Pada BUMDes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto*. Journal of Governance Innovation, 5(1), 161–174.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta.
- Yunanto, S.E. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCESS.